ABSTRAK

Lilis Hidayati Yuli Astutik, NIM, Reklamasi Pantai Jakarta Sebagai Upaya Perluasan Wilayah Daratan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah*, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata Kunci: Reklamasi Pantai Jakarta, Hukum Lingkungan, *Fiqh Bi'ah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus reklamasi pantai Jakarta yang menuai pro dan kontra. Ada golongan yang sangat mendukung kegiatan reklamasi pantai Jakarta ini dengan berbagai alasan yang mereka miliki. Namun tak sedikit yang menentangnya karena merasa sangat dirugikan oleh kegiatan reklamasi pantai Jakarta ini. Penulis sangat tertarik bagaimana jika reklamasi pantai Jakarta ini dilihat dari sudut pandang hukum lingkungan dan *Fiqh bi'ah*.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan? 2) Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Hukum Lingkungan ? 3) Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari *Fiqh Bi'ah* ? Kemudian yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan. 2) Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Hukum Lingkungan. 3) Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari *Fiqh Bi'ah*.

Metode penelitian yang digunakan peneliti memiliki jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalis data pada penelitian ini yaitu *content analysis*, *comparative analysis* dan *critical discourse analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Reklamasi yang merupakan pengembangan kawasan pesisir pantai pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk kegiatan pembangunan kawasan yang dibutuhkan perhatian khusus terhadap proses perubahan dari lingkungan hidup alami menjadi lingkungan buatan. Konsep reklamasi pantai Jakarta di dalamnya memuat aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Berdasarkan data-data dan fakta yang diperoleh ternyata aspek ekonomi lebih dominan. Aspek sosial dan ekologi kurang diperhatikan. Masyarakat khususnya para nelayan merasa sangat dirugikan karena mereka harus kehilangan mata pencahariannya. Selain itu lingkungan khususnya wilayah laut mengalami kerusakan diantaranya musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai, pencemaran laut akibat kegiatan di area reklamasi, serta akibat peninggian muka air laut maka daerah lain rawan tenggelam sehingga air asin laut naik ke daratan. Ini menyebabkan tanaman banyak yang mati, area persawahan sudah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dapat disimpulkan bahwa konsep reklamasi pantai Jakarta tidak semata-mata dilakukan sebagai upaya perluasan wilayah daratan melainkan ada kepentingan lain yakni kepentingan bisnis. 2) Konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari hukum lingkungan adalah sebagai berikut: a) Menurut pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 ayat 1 mengatakan bahwa " Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan

dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi." Berdasarkan pasal ini konsep reklamasi pantai Jakarta tidak sesuai karena ketiga aspek tersebut belum terpenuhi. Aspek teknis mulai dari pengambilan material pasir dari beberapa lokasi yang berbeda sangatlah berbahaya karena bisa mengakibatkan hilangnya pulau tersebut. Kemudian dilihat dari Aspek lingkungan juga sangat memprihatinkan karena kehancuran ekosistem laut akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem alam. Aspek sosial dan ekonomi juga kurang mendapat perhatian karena belum adanya solusi bagi para nelayan yang nantinya akan kehilangan mata pencahariannya. b) Menurut pasal 34 Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 ayat 2 mengatakan bahwa "Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan: keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta persyaratan teknis pengambilan, pengurukan dan penimbunan material." Ini menjadi penjelas bahwa ketiga aspek yang telah disebutkan dalam ayat 1 harus terpenuhi semuanya. Bila hanya salah satu aspek saja yang lebih dominan maka hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. c) Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 14 pengembang proyek reklamasi wajib memiliki instrumen pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup yaitu: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, serta instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan. d) Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1 berbunyi, "Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat." Kemudian diperjelas oleh ayat 2 bahwa "Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai; mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; merelokasi pemukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi." e) Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 pasal 101 ayat 2 mengatakan bahwa, "Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob, dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan Pantura."Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari hukum lingkungan tidak sesuai apabila dari aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi tidak mendapat perhatian yang sama atau berat

sebelah. Selain itu untuk melaksanakan reklamasi instrumen-instrumen penting seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 14 harus dimiliki. 3) Konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari *Fiqh Bi'ah* adalah ajaran Islam yang peduli terhadap lingkungan pesisir pantai tidak melarang proyek reklamasi pantai. Tetapi, ajaran Islam memberikan persyaratan dalam pelaksanaannya yakni harus terjamin keselamatan aspek lingkungannya dan kebijakan proyek reklamasi harus berdasarkan analisis maslahat dan sebesar-besarnya didahulukan untuk kepentingan publik bukan korporasi tertentu.

ABSTRACK

Lilis Hidayati Yuli Astutik, NIM ,A Jakarta Beach Reclamation As An Effort Expansion The Mainland Region Observed From Environmental Law And Fiqh Bi'ah, Family Law Course, IAIN Tulungagung, 2018, adviser: Dr. Iffatin Nur, M.Ag

Keyword: A Jakarta beach reclamation, Environmental law, Fiqh Bi 'ah.

This research was background by the existence of the case "Jakarta Beach Reclamation" that become pro and contra. There is an organization which very supporting the activity by many reason they have. However, there is not a little who oppose it because they feel disadvantaged by Jakarta Beach Reclamation. The researcher so attracted with "How if Jakarta Beach Reclamation observed from environmental law view and Fiqh Bi'ah.

The formulation in this research are 1) How does Jakarta beach reclamation's concept as an effort the expansion mainland region?.2) How does Jakarta beach reclamation's concept observed from environmental law?.3) How is Jakarta beach reclamation's concept observed from Fiqh Bi'ah? .Then the aim of this research are : 1) For explaining Jakarta beach reclamation's concept as an effort the expansion mainland region.2) For explaining Jakarta beach reclamation's concept observed from environmental law.3) For explaining Jakarta beach reclamation's concept observed from Fiqh Bi'ah.

The method of the research used by the researcher, it has kind of library research. The manner of collecting the data that used in this research are documentation and literature study. While the method used by the researcher for analyzing the data in this research are content analysis, comparative analysis and critical analysis.

The result of this research shows that : 1) Reclamation which is the development of coastal area can be seen basically as a form of regional development activity that requires special attention to the process of transformation from the natural environment into an artificial environment. The concept of reclamation Jakarta's beaches contain economic, social and ecological aspects. Based on the data and the facts obtained turned out to be more dominant economic aspects. Social and ecological aspects less attention. The people, especially the fishermen, feel very disadvantaged because they must lose their livelihood. In addition, the environment, especially marine areas suffered damage including the destruction of animals and coastal vegetation, marine pollution due to activities in the reclamation area, as well as the consequence of sea level rise then other areas are prone to drowning so that saltwater rises to the mainland. This causes the plant many are dead, the rice field area cannot be used to grow crops. Could it was concluded that the concept of coastal reclamation of Jakarta is not merely done as an effort expansion of the land area but there are other interests namely business interests. 2) The concept of Jakarta beach reclamation in terms of environmental law is as follows:

a. According to Article 34 of the Law of the Republic of Indonesia Number 27 Year 2007 paragraph 1 said that "Reclamation of coastal areas and small islands is done within to improve the benefits and / or added value of coastal areas and small islands in terms of technical, environmental, social and economic aspects." Under this article the concept Jakarta's coastal reclamation is inappropriate because these three aspects have not been met. Aspect technically starting from taking sand material from several different locations is very dangerous because it could lead to the loss of the island. Then seen from the environmental aspect is also very apprehensive because the destruction of marine ecosystems will be affect the balance of natural ecosystems. The social and economic aspects are also lacking received attention because there is no solution for the fishermen who will be lost his livelihood. b) According to section 34 Indonesia republic law number 27 year 2007 about the management of coastal area and small islands verse 1 said that "the implementation of reclamation as told in verse 1 must to keep and to pay attention : the next life and earn life for environment, The parity between the importance of environmental function conservation of coastal area and small islands also removal technique, fulfilling and piling up materialistic." According to Article 34 of Law of the Republic of Indonesia Number 27 Year 2007 paragraph 2 said that "The implementation of reclamation as referred to in paragraph (1) shall be obligated maintain and pay attention to: the sustainability of life and livelihood of the people, a balance between the interests of utilization and the interests of function preservation coastal environments and small islands as well as the technical requirements of collection, backfill and material hoarding."It becomes clear that these three aspects have been mentioned in verse 1 must be fulfilled all. If only one aspect is more dominant then this is not in accordance with the rules applicable. c) According to Law Number 32 Year 2009 article 14 developer of reclamation project shall have pollution prevention and / or environmental damage instruments, namely: strategic environmental assessment, spatial plan, environmental quality standard, standard criteria environmental damage, environmental impact analysis, management efforts environment and environmental monitoring efforts, licensing, environmental economic instruments living, environmental-based, budget-based legislation environment, environmental risk analysis, environmental audit, and instruments others in accordance with the needs and / or the development of science. d) According to the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2013 that in article 30 paragraphs 1 and 2. In paragraph 1 reads, "Implementation of reclamation shall take care and observe the sustainability of life and livelihood of the people."It is then made clear by verse 2 that "the sustainability of life and livelihood the community can be done by providing access to the community to the coast; maintain the livelihood of the population as fishermen, fish farmers, and other marine and fishery business; provide compensation or compensation to the surrounding communities affected by the reclamation; relocate settlements for the community located at the reclamation site; and empower the affected communities impact of reclamation."e) According to Regional Regulation of DKI Jakarta No. 1 of 2012 article 101 paragraph 2 said that, "The implementation of reclamation must pay attention to environmental interests, interests of the harbor,

the interests of the mangrove forest area, the interests of fishermen, the impact against robust floods, and rising sea and river levels, interests and other functions which is in the Pantura region." From the above explanation it can be concluded that the concept of coastal reclamation of Jakarta in terms of environmental law is not appropriate if from the technical, environmental, social and the economy is not getting the same or partial attention. In addition to implement reclamation of important instruments as mentioned in the Act Number 32 Year 2009 article 14 should be owned. 3) The concept of Jakarta beach reclamation is reviewed from *Fiqh Bi'ah* that the Islamic teachings are concerned to the coastal environment does not prohibit coastal reclamation projects. However, the teachings of Islam provide the requirements in the implementation that must be guaranteed safety aspect the environment and the reclamation project policy should be based on analysis of the issue and as much as possible prior to the public interest not for particular corporation.

ملخص

ليليس هداية يولي أستوتيك ١٧١٢١٤٣٠٤٠ استرداد شاطئ جكرتا لجهد توسع ولاية البر ينظر من قنون البيئة و فقه البيئة, برنامج الأحوال الأشخصية, بقسم الشريعة الجمعية الاسلامية الحكومية تولوغ أكوغ, ٢٠١٨ المؤدب : دكتور عفة النور ماجيستير في التربية الدينية الاسلامية

الكلمات المفتاحية: استرداد شاطئ جكرتا, قنون البيئة, فقه البيئة

هذا البحث على الخلفية بكون حالة استرداد شاطئ جكرتا التي تصير المؤيد و سلبيات. كانت الطائفة التي تدعم جيدا هذه عملية استرداد شاطئ جكرتا باسباب مختلفة عندهم. لكن لا قليلا من الطائفة الأخر يضدون لأنها يخسرهم بسبب هذه عملية استرداد شاطئ جكرتا. المؤلفة تريد أن تفهم بمهتم كيف استرداد شاطئ جكرتا ننظره من منظر قنون البيئة و فقه البيئة.

اما تركيز هذه اللبحث فهو (١) كيف فكر استرداد شاطئ جكرتا لجهد توسع ولاية البر؟ ,و (٢) كيف فكر استرداد شاطئ جكرتا من منظر قنون البيئة؟ ,و (٣) كيف فكر استرداد شاطئ جكرتا من منظر فقه البيئة؟ ويهدف هذا البحث الى شرح فكر (١) استرداد شاطئ جكرتا لجهد توسع ولاية البر,و (٢) استرداد شاطئ جكرتا من منظر قنون البيئة,و (٣) استرداد شاطئ جكرتا من منظر فقه البيئة.

يستخدم هذا البحث المدخل بحوث المكتبة. وتقنيات جمع البيانات في هذا البحث هو توثيق و دراسة الأدب. وقدتم تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل هي تحليل المحتوى والتحليل المقارن وتحليل الخطاب النقدي

اما النتائج التى حصل على الباحث فكما يلى. (١) الاسترداد كان توسع منطق الشاطئ أن أصله منظر كما صورة العملية البنائية لمنطق التي تحتاج احتمام خاص لعملية التغيير من بيئة الطباعية الى أن يكون بيئة الاصطناعية. وفكر استرداد شاطئ جكرتا فيه احتمال جوانب الاقتصادية و الاجتماعية و العلم البيئة. و على أساس المعطيات و الحقيقة كان يوجد و أن حقيقته جانب الاقتصادية أغلب من الأخرى. و جوانب الاجتماعية و العلم البيئة أقل اهتماما. وفكر استرداد شاطئ جكرتا فيه احتمال جوانب الاقتصادية و الاجتماعية و العلم البيئة. و على

أساس المعطيات و الحقيقة كان يوجد و أن حقيقته جانب الاقتصادية أغلب من الأخرى. و جوانب الاجتماعية و العلم البيئة أقل اهتماما. و المجتمع خصوصا كل السماك كانوا بشعرون من الخاسرين جبدا لأنهم فقدان سبل العيشز و سوى ذلك خصوصا في حول ولاية البحر صار فسدا وذلك دمر مكان الحي للحياون و نباتات الشاطئ و التلوث البحري بسبب عملية الاسترداد فيه و رفع مستوى المياه فالمكان الاخر صار قلق الغرق فكان مياه البحر مرتفا الى البر. و هذا سبب النباتات الفساد و منطقة المزرعة كانت لا مستفيدا لزراعة. ونتيجته أن فكر استرداد شاطئ جكرتا لا بستعمل كما لجهد توسع ولاية البر فقط بل يكون فائدة الاخرى بعنى فائدة المعاملة و المتجر. (٢) فكر استرداد شاطئ جكرتا من منظر قنون البيئة هو يلى (أ) عند فصل 34 القنونية رفبليك اندونسيا رقم 27 سنة 2007 عن إدارة المناطق الساحلية والجزر الصغيرة أية 1 قال أن "استرداد المناطق الساحلية والجزر الصغيرة يعمل في ارتفع المنفعة و أو زيادة المناطق الساحلية والجزر الصغيرة من منظر الجوانب الفنية, حي البيئة, و الاجتماعي الاقتصاد." و على هذا الأساس أن فكر استرداد شاطئ جكرتا لا تناسبا لأن تلك ثلاثة الجوانب كانت لا مشتملا فيها. والجوانب الفنية مبدؤ من أخذ الرمال المادية في بعض الأمكان المختلفة كان ضررا جدا لأنه امكاني على اختفى الجزيرة. ثم منظر من الجوانب البيئة صار قلق لأن فساد البحر تأثر توازن العلم. و جوانب الاقتصادية و الاجتماعية أيضا عندهما اهتمام أقل لئلا يكون محاليل عنهما لالصيادين الذين سيختفى رزقهم. (ب) عند فصل 34 القنونية رفبليك اندونسيا رقم 27 سنة 2007 عن إدارة المناطق الساحلية والجزر الصغيرة أية 2 قال أن " تطبيق استرداد كما قصد من أية (1) واجب حفظ و نظر: استدامة الحياة و رزق المجتمع ، والتوازن بين فائدة الاستفادة و أهمية الحفاظ على الوظائف البيئية للجزر الساحلية والصغيرة بالإضافة إلى المتطلبات التقنية لجمع المواد وإغراقها وتخزينها." هذا التفسير من ذلك أن تلك ثلاثة الجوانب التى ذكرت في أية 1 واجب ليشتمل جميعا. اذا كان احد الجوانب فقط التى اغلب مهيمنا فذلك لا يناسب بالحكم تطبق كان. (ج) و على هذا الأساس القنونية رفبليك اندونسيا رقم 32 سنة 2009 فصل 14 أن المطور لمشروع الاسترداد واجب على تمليك أدوات منع التلوث, و الضرر البيئي هي دراسة البيئة إستراتيجي, و التصميم, و معايير الجودة البيئية ، ومعايير الأضرار البيئية ، وتحليل الأثر البيئي ، وجهود الإدارة البيئية وجهود الرصد البيئي ، والترخيص ، والأدوات الاقتصادية البيئية ، والتشريعات البيئية ، والميزنة البيئية ، وتحليل المخاطر البيئية ، ومراجعة الحسابات البيئة ، وغيرها

من الأدوات وفقا لاحتياجات و / أو تطوير العلوم. (د) و على هذا الأساس تنظيم وزير البحر والثروة السمكية رفبليك اندونسيا رقم 17 سنة 2013 أن في فصل 30 أية 1 و 2. و كان في أية1 قال : تطبيق الاسترداد واجب لحفظ و نظر الاستمرارية الحياة و معيشة المجتمعية. ثم فسر بالاية 2 أن "الاستمرارية الحياة و معيشة المجتمعية يجوز أن يفعل بمنح وصول للمجتمع حتى الشاطئ و حفظ رزق السكان كما السمك و مزارعي الأسماك ، وغيرها من الأعمال البحرية والسمكية ؛ تقديم تعويض أو تعويض للمجتمعات المتضررة من الاسترداد ؛ نقل المستوطنات للمجتمعات الموجودة في مواقع الاسترداد ؛ وتمكين المجتمعات المتضررة حول الاسترداد." . (ه) و على هذا الأساس تنظيم المنطقة المقاطعة جاكرتا رقم 1 سنة 2012 فصل 101 أية 2 قال تطبيق الاسترداد يجب على من أن ينظر فائدة البيئة و الميناء و مساحة غابات المانغروف و السمك و تأثير على الفيضان و رفع البحر و الانهار و فائدة و وظيفة اخرى التي كان في منطقة فنتورا. و من تعرض ذلك كان نتائجة أن فكر الاسترداد شاطئ جاكرتا منظر من الحكم البيئة لا يناسب ان كان من الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لا يكون احتمام منها معا أو غير متوازن. و سوى ذلك لعمل الاسترداد الأداة المفيدة كما ذكر في القنونية رفبليك اندونسيا رقم 32 سنة 2009 فصل 14 واجب أن يملك. (3) وفكر استرداد شاطئ جكرتا من منظر فقه البيئة أن الاسلام كان رعاية به لبيئة شاطئ لا بنهى مشروع استرداد ساحلي و شاطئ. بل أن الاسلام يعطى الشرائط في عمليته يعنى يجب أن يكون مضمون السلامة الجوانب البيئة و حكمة مشروع الاسترداد يجب أن أسس تحليل المصلحات وكأسب الأولوية للمصلحة العامة بدلاً من بعض الشركات.